

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dibukanya pintu ijtihad pada masa abad ke-19, salah satu karakteristik agama Islam adalah kejayaan ijtihad di bidang politik, namun sebelumnya penuturan sejarah Islam pun dipenuhi oleh kisah kejayaan sejak Nabi Muhammad *saw* sampai setelah beliau wafat. Sejalan dengan kejayaan politik itu ialah sukses yang spektakuler para militer mereka, khususnya ketika di bawah pimpinan para sahabat Nabi diantaranya Abu Bakar Shidiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan istilah *Khalifah*.

Menurut Prof. Dr. H.A.Hafiz Anshari, MA, fenomena tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan urusan politik dan ketatanegaraan¹. Sebaliknya, sejarah juga mencatat bahwa tidak sedikit perpecahan, pertentangan, dan bahkan juga pertumpahan darah dalam tubuh umat Islam yang terjadi, justru karena polemik politik. Dimulai dari peristiwa terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang kemudian para pemimpin Islam lain ikut dalam pertentangan yang tak pernah berhenti sehingga melahirkan berbagai aliran politik.¹

Sejak berakhirnya masa al-khulafa'al-rasyidun pemerintahan di dunia Islam mengambil bentuk monarki absolut. Suasana inilah yang terdapat ketika pengaruh kebudayaan Barat masuk ke dunia Islam pada abad ke-19. Bagi para pemikir Islam dalam bidang politik, pada mulanya yang terkesan dari kebudayaan Barat adalah paham konstitusi kemudian menyusul republik. Sebagai akibatnya, di dunia Islam lahir suatu gerakan yang disebut gerakan *konstitusionalisme*²

Di antara pemikir yang melontarkan gagasan mengenai pentingnya *konstitusi* adalah Rifa'ah Badawi Rafi'i al-Thahthawi (1801-1873 M). Ia

¹. Ketika menyampaikan uraian ini dalam *Mata Kuliah Politik Islam dan Tatanegara* dalam diskusi kelas Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, pada hari jum'at, tanggal 12 April 2002.

². Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 114.

menyimpulkan bahwa untuk kemajuan suatu masyarakat, kekuasaan absolut raja harus dibatasi.³ Menurut Jamal al-Din al-Afghani (1839-1897 M), pemerintahan *absolut* merupakan salah satu factor penyebab kemunduran Islam.⁴

Pemikir-pemikir politik Islam ramai membicarakan konsep negara Islam. Para pemikir tersebut antara lain adalah Muhammad Abduh (1849-1905 M), Ali Abdurraziq (1888-1966 M), Al-Mawardi (370-450 H), Ibnu Abi Rabi' Hasan al-Banna (1906-1949 M), Sayyid Qutb (1906-1966 M), Syekh Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M) dan Maulana A.A Al-Maududi (1903-1979 M), Muhammad Husayn Haykal (1888-1956 M), dan masih banyak yang lainnya.

Memahami masalah politik dalam Islam memang bukan soal yang sederhana.. Menurut Nurcholis Madjid,⁵ ada dua alasan : *Pertama*, bahwa Islam

³. At-Thathawi, *Talkhis Al-Ibriz fi Talkhis Baris*, Kairo; Dar-al-Taqdim, t,th), hal. 81.

⁴. Harun Nasution, *Op. Cit*, hal. 55.

⁵. Salah satu tokoh kenamaan di Indonesia yang memiliki visi modernitas dalam Islam. Ruang diskusi Islamnya bermuara pada 3 hal utama yakni: ke-Islaman, kemodernan dan ke-Indonesiaan. Fokus pemikirannya pada diskursus Islam dan Modernitas bukannya tanpa alasan. Meskipun sering mengutip pernyataan sosiolog Robert. N Bellah bahwa Islam memiliki kelenturan luar biasa (compatible) dengan modernitas, dan bahwa hal-hal ideal di era modern Barat sekarang secara teknis sudah terdapat pada zaman Islam salaf (klasik), namun realitas kekinian yang berkembang di dunia Muslim, di mana proses modernisasi banyak menemui hambatan jelas menggelitik pikirannya ada yang keliru dalam proses modernisasi di dunia Muslim.

Lahir di Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939. Lihat: Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta : Paramadina, 1995), hlm. 224. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1358 H. Nurcholis Madjid adalah putra dari seorang petani Jombang yang bernama H. Abdul Madjid. Abdul Madjid adalah seorang ayah yang rajin dan ulet dalam mendidik putranya dia adalah seorang figur ayah yang alim. Dia merupakan Kyai alim alumni pesantren Tebuireng dan termasuk dalam keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU), yang secara personal memiliki hubungan khusus dengan K.H Hasyim Asy'ari, salah seorang founding father Nahdlatul Ulama. H. Abdul Madjid inilah yang menanamkan nilai-nilai keagamaan kepadanya dirinya masih berusia 6 tahun. Dalam mempersepsikan tatanan pendidikan yang diberikan oleh ayahnya, mencatat:

Meskipun pendidikan resmi Abdul Madjid hanya tamatan SR, tetapi ia memiliki pengetahuan yang luas. Fasih dalam bahasa Arab dan mengakar dalam tradisi pesantren. Abdul Madjid sering dipanggil "kyai haji", sebagai penghormatan atas ketinggian ilmu keislaman yang dimilikinya, walaupun ia sendiri secara pribadi tidak pernah menyebut diri sebagai kyai dan tidak pernah secara resmi bergabung dengan kalangan ulama. Dan meskipun ia tetap menyebut diri sebagai orang biasa, namun hal itu tidaklah membendung keinginannya untuk mendirikan sebuah madrasah. Bahkan ia menjadi pengelola utama pada pembangunan madrasah yang ia kelola sendiri dan juga yang paling berperan dalam membesarkan madrasah wathoniyah di Mojoanyar Jombang.

Penanaman nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan oleh H Abdul Madjid kepada CAK NUR, bukan saja melalui penanaman aqidah, moral, etika, atau pun dengan pembelajaran membaca al-Qur'an saja, akan tetapi juga dengan arah pendidikan formal bagi CAK NUR. Pendidikan dasar yang ditempuhnya pada dua sekolah tingkat dasar, yaitu di Madrasah al-Wathoniyah dikelola oleh ayahnya sendiri dan di Sekolah Rakyat (SR) di Mojoanyar, Jombang. (lihat: Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia, Pemikiran Neo-Modernisme CAK NUR*,

telah membuat sejarah selama lebih dari 14 abad sehingga merupakan suatu kenafian jika dianggap bahwa selama kurun waktu yang panjang tersebut segala sesuatu tetap berhenti, sementara sedikit sekali umat Islam yang memiliki pengetahuan, apalagi kesadaran tentang sejarah, *kedua*, selain beraneka ragamnya bahan-bahan kesejahteraan yang harus dipelajari dan diteliti, dalam sejarah Islam juga terdapat perbendaharaan teoretis yang amat luas tentang politik yang hampir setiap kali muncul bersama dengan munculnya sebuah peristiwa sejarah.⁶

Menurut Hafiz, di Eropa pada abad itu pula muncul paham *Konstitusionalisme* yang membatasi kekuasaan raja-raja *absolut*, Umat Islam pun kembali disibukkan oleh pergulatan wacana mengenai kekuasaan negara. Dari hasil pergulatan itu kita mewarisi tiga pola pemikiran mengenai hubungan antara agama dan negara.

Pertama pola pemikiran *sekuler*, yang menyatakan bahwa dalam Islam tidak ditemukan aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah kenegaraan. *Kedua* pola *tradisionalis* yang menegaskan bahwa dalam Islam ditemukan semua aturan termasuk aturan hidup bernegara. *Ketiga* pola *reformis*, yang menegaskan bahwa dalam Islam cukup memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat dipedomani manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

Ada tiga aliran dalam tubuh umat Islam yang berbeda pandangan tentang hubungan antara Islam dan politik antara lain;

Aliran pertama berpendirian, bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia

Djohan Effendi, Ahmad Wahid, dan Abdurrahman Wahid, terj., *Nanang Tahqiq* (Jakarta : Paramadina, 1999), hlm. 72-75)

Pemikiran Nurcholis Madjid yang sedemikian rupa tentu tidak lepas dari pengaruh lingkungan rumah dan eksistensi keluarga serta pengaruh terbesarnya terletak pada asuhan yang diberikan oleh sang ayah. Jadi, sejak tingkat dasar, CAK NUR telah mengenal dua model pendidikan. Pertama, pendidikan dengan pola madrasah, yang sarat dengan penggunaan kitab kuning sebagai bahan rujukannya. Kedua, CAK NUR juga memperoleh pendidikan umum secara memadai, sekaligus berkenalan dengan metode pengajaran modern. Pada masa pendidikan dasar ini, khususnya di Madrasah Wathoniyah, Nurcolish Madjid sudah menampakkan kecerdasannya dengan berkali-kali menerima penghargaan atas prestasinya. (Siti Nadroh, Wacana Keagamaan dan Politik CAK NUR (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 21.)

⁶. Nurcholis Madjid, *Kata Sambutan* dalam Munawir Zyadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta, UI Press, 1990, hal. vi-vii.).

⁷. H.A.Hafiz Anshari, *Ibid*.

dengan Tuhan, sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. penganut ini pada umumnya berpendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang *konprehensif*. Di dalamnya terdapat sistem politik. Oleh karenanya, dalam kehidupan bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan kehidupan bernegara yang Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dan empat sahabatnya Abu Bakar Shidiq, Umar bin Khottab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib atau yang lebih dikenal sebagai *al-khulafa al-rasyidun*. Para tokoh aliran ini antara lain di pelopori oleh Hasan al-Banna,⁸

⁸. Hidup antara tahun 1906 dan 1949 Masehi. Lahir di Mahmudiyah, kota kecil yang terletak di sebelah timur laut Kairo. Setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah guru, al-Bana muda meneruskan pelajaran di *Dar al -Ulum*, Kairo dan di kota besar itulah dia diperkenalkan dengan Rasyid Ridha beserta gerakan *Salafiyahnya*. Dia rajin membaca *al-Manar*, dan melalui itulah ia menyerap semangat pembaharuan Afghani dan Abduh. Pada tahun 1928 dia dikenal sebagai salah seorang tokoh kharismatik yang memimpin *al-Ikhwan al-Muslimin*, yang didirikan di Islamiyah, sebelah timur laut Kairo. Sebuah organisasi yang bergerak di bidang reformasi moral dan social. Namun kemudian organisasi ini lambat laun bergerak di bidang politik yang amat tangguh. Aspirasi politiknya juga makin terkristalisasi, yakni secara jelas mandambakan berdirinya negara Islam di Mesir. Pengertian dan pemahaman *al-Ikhwan al-Muslimin* tentang ajaran Islam pada umumnya dan tentang masyarakat Islam serta negara Islam sangat diwarnai oleh ajaran pendiri organisasi tersebut.

Kata *Ikhwanul Muslimin* sendiri muncul dalam pidato Hasan al-Bannah, ketika ia mengatakan “*Kita bersaudara di dalam mengabdikan diri kepada Islam. Karena itu kita adalah ikhwanul Muslimin*”. Organisasi ini didirikan pada tahun 1928 di Ismailiyah. Pada tahun 1945, *Ikhwanul Muslimin* mengerahkan kegiatannya secara besar-besaran di kota-kota dan desa-desa dengan mengadakan muktamar-muktamar daerah untuk menuntut dua hal: 1) Pengusiran Inggris dan kemerdekaan penuh untuk Mesir. 2) Persatuan Lembah Nil (Mesir dan Sudan). Padahal saat itu Inggris ingin memisahkan antara Mesir dan Sudan. Dengan jumlah anggota yang sangat banyak dan tersebar luas, organisasi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan politik di Mesir. Pada tahun 1948 *Ikhwanul Muslimin* memiliki 2000 cabang dengan jumlah anggota aktif sekita 500 ribu orang, belum termasuk simpatisannya. sehingga Perdana Menteri al-Nugrasyi khawatir gerakan ini dapat membahayakan stabilitas politik dan keamanan di wilayahnya. Karena itu, pada tahun 1948 ia membubarkan organisasi tersebut; dan Hasan al-Banna sendiri ditembak mati oleh rezim penguasa pada tanggal 12 Februari 1949. Karya-karyanya : *Ushul Fahmi fil da'watinna, Lau kaanat Lanaa Hukumah Islamiyah, "Alla dhifafil Qanaati, Qalamut tajiil, Hasan al-Bana Yuthalibi Bihukumil Islam, At-Tashawwuf wal akhlaaq, Thariiqani baina Quwwataini, Haulal Ka'ba*. Lihat. Ali Abdul Halim Mahmud, *Ikhwanul Muslim Konsep Gerakan Terpadu*, terj. Masykur Hakim, Ubaidillah, jilid I, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hal. 23-24-25-37. lihat juga. Harun Nasution, Mukti Ali dkk, hal. 351. dan lihat, H.A. Hafiz Ansyary, *Tokoh Islam* (Serambi Ummah, 21-27 Jan-2000), *Hasan al-Banna Perintis Gerakan Dakwah Internasional*, Banjarmasin, 2000.

Sayyid Qutb,⁹ Syekh Muhammad Rasyid Ridha,¹⁰ dan Maulana A.A Al-Maududi.¹¹

Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran kedua ini Nabi Muhammad adalah Rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, yakni mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur. Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokoh terkemuka aliran ini adalah Ali Abd. Al-Raziq.¹²

⁹. Ia lahir pada tahun 1906 dan wafat tahun 1966, adalah lulusan *Dar al-Ulum* Kairo dan memulai karirnya sebagai guru sekolah, sama seperti Hasan al-Banna kemudian diangkat menjadi penilik pada kementerian Pendidikan. Pada tahun 1948 ia menulis buku dengan judul *Al-Adalah al-Ijtimaiyah fi al-Islam (Keadilan Sosial dalam Islam)*, *Ma'arakat Al-Islam wa Ar-Rasmaliyah (Pergulatan antara Islam dan Kapitalis)*, *As-Salam al-Alami Wa al-Islam (Perdamaian Dunia dan Islam)*, *Ma'alim Fi Ath-Tharia (Papan Petunjuk Jalan)*, *Fi Zhilal al-Qur'an, Hadza ad-Din (Inilah agama)*, . Pemahamannya tentang agama dan politik terdapat kesamaan dengan Rasyid Ridha dan al-Banna. Di antaranya yang paling mendasar adalah "Islam adalah suatu agama yang sempurna dan amat lengkap, yang meliputi tidak saja tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik

¹⁰. Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935) adalah kelahiran *Tripoli* dan murid terdekat Abduh, ia aktif di bidang pers, politik, dan pendidikan serta kajian pemikiran keagamaan. Sepeninggal Abduh, Ridha melanjutkan apa yang dirintis gurunya, yakni pembaruan keagamaan, dengan meneruskan penerbitan majalah *Al-Manar*, dan juga *tafsir Al-Qur'an* dengan nama yang sama. (baca Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, UI, 1990).

¹¹. Nama lengkapnya adalah Abu al-A'la al-Maududi, ia adalah pemikir besar Islam *kontemporer*, anak benua India. Ia dilahirkan pada 25 september 1903 di *Aurangabad*, India tengah. Pokok-pokok pikirannya tentang kenegaraan dituangkan dalam majalah *Tarjuman al-Quran*, disamping itu juga dalam bukunya yang berjudul *Perang Dalam Islam* dan enam risalahnya antara lain *Teori Politik Islam, Metode Revolusi Islam, Hukum Islam dan Pelaksanaannya; Kodifikasi Konstitusi Islam; Hak-hak Golongan Dzimmi Dalam Negara Islam dan Prinsip-prinsip Dasar Negara Islam*.

¹². Ia dilahirkan di sebuah desa di pedalaman propinsi Menia, Mesir Tengah pada tahun 1888. Dia berasal dari keluarga feodal yang aktif dalam kegiatan politik. Ayahnya bernama Hasan Abdurraziq seorang pasha besar yang mempunyai pengaruh dan tanah yang luas. Hasan Abdurraziq pernah menjadi ketua partai rakyat (*Hizb al-Umaah*), tahun 1907. sesudah revolusi 1919 dibentuk partai baru kelanjutan *Hizb al-Ummah* yaitu *Hizb al-Ahrar al-Dusturiyyah* yang punya keterkaitan dengan Inggris. Partai ini didirikan oleh adik kandung Ali Abdurraziq, Hasan Abdurraziq. Hasan bekerja sebagai pejabat pada kantor Sultan Husin, yang merupakan agen Inggris paa saat perang dunia I. Pada Oktober 1922 Hasan tewas terbunuh pada saat keluar dari menghadiri rapat dewan partai. Selain Hasan Ali Abdurraziq juga mempunyai seorang kakak yang bernama Mustafa Abdurraziq, pernah menjadi menteri wakaf dan pada akhir masa hidupnya menjadi Syekh al-Azhar.

Pada saat berumur relatif muda yakni 10 tahun. Ia belajar di Universitas al-azhar. Dia belajar tentang hukum (*Canon Law*) di bawah bimbingan Syekh Ahmad Abu Khatwah, seorang sahabat Muhammad Abduh. Ahmad juga menjadi murid dari pembaharu terkenal Jamaluddin al-Afgani. Pada tahun 1910 Dia mengikuti perkuliahan di *al-Jami'ah al-Mishriyyah (Egyptian University)*,

Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi aliran ini juga menolak anggapan agama *Islam* adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara. Di antara tokoh-tokoh dari aliran ini ialah seorang pengarang Islam yang terkenal dan penulis buku *Hayatu Muhammad* dan *Fi Manzil al-Wahyi* yang sudah dialihbahasakan dari berbagai bahasa, sedangkan ke bahasa Indonesia sudah pada edisi ke empat belas oleh Ali Audah,¹³ tokoh tersebut bernama Mohammad Husain Haikal.¹⁴

sekarang terkenal sebagai Jami'ah al-Qahirah . Di Universitas tersebut terdapat beberapa dosen asing, diantaranya profesor Nallino yang mengasuh mata kuliah *The History of Arabic Literature* (Sejarah Sastra Arab), dan Profesor Santillana mengasuh mata kuliah Sejarah Filsafat (*History of Ohilosophy*). Pada tahun 1911 Ali mendapat ijazah 'alimiyah dari al-Azhar dan pada tahun 1912 ia mulai memberi pelajaran di universitas ini. Di tahun ini pula ia melanjutkan studinya ke Inggris, Setelah satu tahun ia tinggal di London mempelajari bahasa Inggris, ia memasuki Universitas Oxford (*Oxford University*) mempelajari ekonomi dan politik. Pada tahun 1915 ia kembali ke Mesir dan di tunjuk menjadi hakim pada Mahkamah Syari'ah (Syari'ah Courts). Dalam kedudukan dan pekerjaannya sebagai hakim inilah ia mengadakan talaah dan penelitian tentang sejarah peradaban Syara dan hasilnya ia bukukan dengan judul *Al-Islam wa Ushul al-Hukm (Islam and the Fundamentals of Authority)* Karyanya tentang politik ini dirumuskan dalam bukunya yang berjudul *Al-Islam wa Ushul al-Hukm* Ia berpendapat bahwa pemerintahan negara bukanlah tugas dari kerasulan, melainkan tugas yang terpisah dari *dakwah Islamiyah* dan berada di luar tugas kerasulannya. Pemerintahan yang pernah dibentuk oleh *Nabi* adalah amal duniawi yang tidak ada kaitannya dengan tugas kerasulan.

Buku hasil karyanya ini berisikan penolakan terhadap sistem khalifah dalam Islam. Reaksi ulama pun bermunculan terhadap pendapat yang dituangkan dalam karyanya ini. Pada tahun 1925 dihadapkan kepada *Haiatu kibarul ulamail Azhar* (Dewan Ulama al-Azhar) yang terdiri dari 25 ulama al-Azhar dipimpin Syekh al-Azhar. Dewan ini akhirnya memecetnya sebagai hakim Mahkamah Syar'iyah di Mashuriyah dan sebagai ulama al-Azhar sebab dia dianggap bersikap tidak sesuai sebagai seorang yang alim. Lihat, Ali Abdurraziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Kairo , 1925, halaman 39). Dan lihat, Afif Mohammad dengan judul *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Bandung; Pustaka, 1985, hal. Ix-x. lihat juga, Charles C. adam, *Islam and Modernism in Egypt*, New York; Russel & Russel, 1968, hal. 259-261. Lihat pula, H.A.R. Gibb, *Modern Trend in Islam*, diterjemahkan dengan *Aliran-Aliran Modern dalam Islam* oleh Machnun Hudein, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, 1993, hal. 91-92.

¹³. Nama lengkapnya adalah Ali bin Salim bin Abd Hafidz bin Abdullah bin Audah, lahir tanggal 14 Juli 1924 di Bondowoso, Jawa Timur. Ayahnya bernama Salim Audah dan ibunya bernama Aisyah Jubran. Pada saat usia Ali Audah tujuh tahun, ayahnya meninggal dunia. Saat itu, keempat saudara Ali Audah antara lain Muhammad Audah (Ayah penulis) Abd. Hafidz (ayah Salim pimpinan Percetakan Litra Antarnusa) Sholeh dan Hindun belum ada yang bekerja.

Tahun 1961-1978 Ali Audah mengajar agama Islam di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ). Selanjutnya, ia menjadi ketua Himpunan Penerjemah Indonesia dan menjadi Dewan Redaksi majalah *Horison*, serta menjadi dosen Humaniora di Institut Pertanian Bogor

Saat pendudukan Jepang, Ali Audah menulis cerpen, kemudian cerpen itu dikirimkannya ke majalah yang terbit di Jakarta. Namun, karangannya itu tidak ada satu pun yang dimuat. Hal itu

Perbedaan pandangan seperti tersebut di kalangan ulama dan cendekiawan Islam sangat mungkin, dikarenakan cara pandang dan *perspektif* mereka yang berbeda melihat *Al-Qur'an* sebagai sumber agama Islam dan begitu pula terhadap *Hadits*. Memang secara *ekspilisit ayat-ayat Al-Qur'an* tidak menyebutkan

tidak membuatnya putus asa. Ia terus berusaha dan semakin banyak membaca dan mengarang. Pada tahun 1946 Ali Audah mengikuti lomba mengarang sandiwara di Jawa Timur. Tanpa disangka ia menang dalam perlombaan itu. Dengan kemenangan itu, Ali Audah mencoba menulis sajak, kemudian sajak-sajak nya itu dikirimkan ke majalah Sastrawan yang terbit di Malang.

Ali Audah kini lebih dikenal sebagai seorang penerjemah daripada sastrawan. Dua puluh tahun lebih ia menerjemahkan buku-buku sastra, filsafat, dan agama. Lebih lanjut, Ali Audah mengkhususkan diri dalam menerjemahkan karya sastra Arab modern. Pengkhususan itu dilakukan atas dorongan Asrul Sani. Ali Audah juga mempunyai perhatian yang besar dalam pengajaran sastra di sekolah (SLTA). Karya: a. Cerpen: (1) "Darah dan tokoh". *Zenith*. (2) "Cerita Nenek". *Indonesia*. (3) "Harapan". *Kisah*. (4) "Kandas". *Siasat*. (5) "Kedamaian Meretak". *Siasat*. (6) "Kegagalan yang Terakhir". *Kisah*. (7) "Malam Penuh Bintang". *Mimbar Indonesia*. (8) "Supir Gila". *Roman*, (9) "Kemarau". *Siasat*. (10) "Malam Bimbang". *Siasat*. (11) "Mardiah". *Indonesia*. (12) "Kawan Seperjalanan". *Roman*. (13) "Mustar". *Kanfrontasi*. (14) "Bumi Pelarian". *Gema Islam*. (15) Malam Bimbang (kumpulan cerpen). 1962. Jakarta: NV Nusantara. (16) *Icih* (kumpulan cerpen). 1972. Jakarta: Pustaka Jaya. b. Novel: *Jalan Terbuka*. 1971. Jakarta : *Litera*. c. Puisi : "Kalau Air Mengalir". Sasterawan. d. Drama: "Hari Masih Panjang". *Sastra*. f. Terjemahan (1) *Suasana Bergema* (kumpulan cerpen). 1957. Jakarta : Balai Pustaka. (2) *Peluru dan Asap* (kumpulan cerpen). 1967. Bandung : Alma'arif. (3) *Genta Daerah Wadi* (kumpulan cerpen). 1967. Singapura : Pustaka Nasional. (4) *Kisah-Kisah Mesir* (kumpulan cerpen). 1977. Jakarta : Pustaka Jaya. (5) *Di bawah Jembatan Gantung* (kumpulan cerpen). 1983. Jakarta: Pustaka Firdaus. (6) *Lampu Minyak Ibu Hasyim*. 1984. (7) *Hari-Hari Berlalu Toha Husaian*. 1985. Jakarta : Pustaka Jaya. (8) *Kisah-Kisah Empat Negara*. 1982. Jakarta: Pustaka Jaya. g. Karya Lain: (1) "Iqbal, Quran dan Sastra Islam". *Pelita*. 1937. (2) "Sandiwara dan Film". *Mimbar Indonesia*. 1953. (3) "Seorang Penerjemah Bukan Sekedar Menyalin Kata-Kata". *Haluan*. 1975. (4) "Menulis Sejarah Filsafat". *Kompas*. 1978. (5) "Yang Mapan, yang Absurd, yang Mbeling, Biar Mereka Bicara". *Kompas*. 1981. (6) "Kutub-Kutub Sastra Sufi I". *Berita Buana*. 1986.

¹⁴ Haikal adalah salah seorang pengikut Abduh. Di samping pemikir, ia juga wartawan, sastrawan, sejarawan, dan sekaligus politikus. Ia hidup pada masa pemerintahan raja-raja keturunan Muhammad Ali. Haikal mengalami tiga kali perubahan dalam bentuk pemerintahan di Mesir. Pertama, sejak masa Tawfiq (1879-1892) sampai masa Fu'ad I (1917-1936), bentuknya *monarki absolut*. Kedua, tahun 1922, setelah revolusi Mesir 1919, berubah menjadi *Monarki Konstitusional*, sampai masa Faruq (1936-1952). Ketiga, setelah *revolusi* Juli 1952 dipimpin oleh Jamal Abd al-Nasir (1918-1970) Pemerintahan Mesir berubah bentuk menjadi Republik.

Ia adalah doktor lulusan Universitas Sorbone, Perancis. Ia dikenal penulis produktif di bidang sejarah, sastra, agama dan politik. Bukunya yang terkenal adalah "*Hayat Muhammad*" Pokok-pokok pikirannya tentang politik dan kenegaraan termuat dalam karyanya yang berjudul *Al-Hukumat al-Islamiyat* (Pemerintahan dalam Islam). Ia termasuk dalam kelompok yang memiliki paham bahwa Islam tidak menentukan sistem dan bentuk pemerintahan yang harus diikuti oleh umat. Ia menyatakan, Sesungguhnya Islam tidak menetapkan sistem tertentu bagi pemerintahan, tetapi Islam meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi tingkah laku dan *muamalah* dalam kehidupan antar manusia.

Kaidah-kaidah menjadi dasar untuk menetapkan sistem pemerintahan yang berkembang sepanjang sejarah. Ia juga membenarkan kehidupan bernegara bagi umat Islam baru mulai setelah *Nabi* dan pengikutnya *hijrah* dan menetap di kota Madinah. Lihat Musda Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husayn Haykal*, Jakarta, 2001, hal. 7. Dan lihat Muhammad Husain Haikal, *Al-Hukumat al-Islamiyat, Dar-al-Ma'arif*, Mesir, 1983, hal. 4.

bagaimana seharusnya mengatur dan pada batas-batas mana serta bagaimana seharusnya hubungan antara agama dengan negara. Para cendekiawan *Islam* sekarang mempunyai pendapat yang berbeda-beda meskipun pada intinya sama dengan pernyataan tersebut di atas. Misalnya, Fazlurrahman menyatakan bahwa pada masa Rasulullah baru ada suku-suku belum negara. *Al-Qur'an* hanya menyebutkan “*Syuura Bainahum*” atau bermusyawarah diantara mereka. Pada zaman *Abbasiyah*, pemimpin diangkat begitu saja dari kaumnya. Pada masa sekarang, kita mengadopsi dari Barat, yakni lewar parlemen. Kaum Islam ortodok memang tak bisa menerimanya, tapi parlemen itu juga sesuai prinsip “*Syuura Bainahum*”.

Melihat pernyataan Fazlurrahman tersebut, secara *implisit* beliau tidak menyetujui adanya “Negara *Islam*”.

Pendapat semacam ini banyak diikuti oleh tokoh modern lainnya. Nurcholis Madjid, misalnya berpendapat: hubungan antara agama dan negara bukanlah hubungan saling menguasai namun satu sama lain bersifat dialogis terus menerus. Begitu pula hubungan antara ideology dan agama. Bahkan Nurcholis Madjid dalam soal negara menganggap hal ini bersifat *instrumental*, dalam arti hanya alat untuk mewujudkan masyarakat etis yang gridhai Tuhan. Dalam tulisan ini, Abdurrahman Wahid¹⁵ melihat sebagai hubungan yang *komplementer* satu sama lain, yang saling membutuhkan.¹⁶

¹⁵. Lahir 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur, dengan nama Abdurrahman ad-Dakhil, ia tumbuh dan berkembang di tengah keluarga santri-sunni, Kakeknya, KH. Hasyim Asy'ari, adalah pendiri NU, ayahnya KH.A. Wahid Hasyim, adalah Menteri Agama RI pertama dan aktif dalam Panitia Sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta.

Meskipun berasal dari keluarga santri, sebagai jenjang pendidikan formal Gusdur ditempuh di sekolah-sekolah “sekuler”. Ia lulus dari Sekolah Rakyat (SR) di Jakarta tahun 1953. tahun 1953-1957, ia belajar di sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) Yogyakarta. Di Yogyakarta ini ia tinggal di rumah salah seorang anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah, KH. Junaid. dari 1957-1959 ia belajar ke Pesantren Tegalrejo Magelang dan kemudian pindah ke Pesantren Mu'alimin Bahrul Umum, Jombang, sampai tahun 1963. kemudian ia juga pindah ke Pesantren Krapyak Yogyakarta, dan menetap di rumah tokoh NU terkemuka, KH. Ali Ma'shum.

Tahun 1964, Gusdur berangkat ke Kairo untuk belajar di Universitas al-Azhar. Namun sebagian besar waktunya di Mesir dihabiskan di ruang perpustakaan, terutama American University Library, sebuah perpustakaan terlengkap di kota itu. Dari Mesir ia pindah ke Universitas Bagdad mengambil Fakultas Sastra.

Dengan latar belakang pendidikan, pergaulan dan perkenalan dengan dunia keilmuan yang cukup ko Cak Nuropolit itu, Gusdur mulai muncul kerpemukaan percaturan intelektual Indonesia dengan pemikiran-pemikiran briliannya pada tahun 1970 –an, ketika ia mulai aktif di berbagai

Masalah cita-cita bentuk negara ideal bagi umat Islam setelah Nabi wafat memang terus menjadi pemikiran yang tidak pernah berhenti. Jauh-jauh telah menjadi pemikiran para filosof dan tokoh Islam dari zaman ke zaman. Misalnya al-Ghazali jauh-jauh sudah merindukan negara yang ideal bagi umat Islam dengan konsep “Negara Moral”.¹⁷

Untuk sekedar mengetahui pemikiran tentang konsep “Negara Moral” al-Ghazali penulis mencoba menguraikan secara *historis* berikut ini.

Sudah sejak lama dari zaman purba, para ahli membicarakan soal negara dan moral, serta bagaimana hubungan antara keduanya. Filosof Yunani Aristotle (384-322 SM) misalnya, menulis buku berjudul “*Politeia*” untuk politik negara, dan “*Nicomachean Ethics*” untuk moral. Pembahasan di seputar dua masalah ini ramai dilakukan, baik satu persatu maupun hubungan antara keduanya.

St. Augustine (354-430 M). membicarakan hubungan keduanya dalam cita-citanya hendak mendirikan negara yang berdasarkan agama dalam bukunya “*Civitate Dei*”. Digambarkannya adanya dua Tuhan dalam agama-agama purba,

lembaga sosial, LSM dan forum-forum diskusi. Kendati latar belakang, menurut Greg Barton, ia secara intelektual jauh lebih siap untuk berpartisipasi dalam wacana-wacana besar mengenai pemikiran Barat, pendidikan Islam dan masyarakat Muslim. Studinya di Bagdad telah memberikan dasar-dasar yang baik mengai pendidikan bercorak liberal dan bergaya Barat serta sekular.

Sejak kembali dari Bagdad, Gusdur aktif dalam berbagai forum diskusi, seminar dan menulis kolom di berbagai media massa. Beberapa tulisannya sudah dibukukan antara lain dalam, Bunga Rampai Pesantren (Dharma Bakhti, 1979), Muslim di Tengah Pergumulan (LkiS, 1997) dan tabayyun Gusdur (LkiS, 1998). Lihat juga Umaruddin Masdar, Membaca Pemikiran Gusdur dan Amien Rais Tentang Demokrasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, H, 119-121. Lihat juga, Imran Hamza & Choirul Anam (Ed), Sebuah dialog mencari Kejelasan: Gusdur diadili Kiai-Kiai (Surabaya, Jawa Post, 1989, h, 11.

¹⁶. Ishomuddin, *Diskursus Politik dan Pembangunan, Melacak Arkeologi dan Kontroversi Pemikiran Politik dalam Islam*, UMM, Malang, 2001, hal. 74.

¹⁷. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid al-Ghazali atau Imam al-Ghazali, seorang teolog terkemuka, ahli hukum, pemikir original, ahli *tasawuf* terkenal dan yang mendapat julukan *Hujjah al-Islam*. Karyanya yang terkenal adalah *Ihya Ulumuddin* (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama) yang terdiri dari enam jilid. Teori kenegaraan al-Ghazali dapat dipelajari terutama dari tiga karya tulisannya, yaitu *Ihya Ulumuddin*, *Dar a-Fikr*, *Beirut*, 1975, khususnya Kitab *al-Sya'ah*, *Al-Iqtishad fi al-Itar al-Iqad* (Modernisasi Dalam Kepercayaan), Kairo 1329 H., dan *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Mulk* (Batangan Logam Mulia tentang Nasihat Untuk Raja-raja, *Al-Tibr al-Masbuk*, Kairo, 1327 H. Al-Ghazali yang menolak secara tegas akan falsafah Yunani menyandarkan segala pendiriannya kepada ajaran-ajaran Islam, dan menyimpulkan bahwa moral dan politik bukan saja saudara kembar yang tidak boleh dipisahkan, tetapi keduanya adalah satu yang tidak dapat dibagi. Dia tidak bersedia menyebutkan “Moral dan Politik”, tetapi secara *konsekuen* dia mengemukakan akan satu kata majemuk yang senafas, ialah ‘moral politik’ atau ‘politik moral’, yang disebutkan di dalam bahasa Arab “*siyasat-ul-akhlak*” Baca H.Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral, Menurut Imam Al-Ghazali*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975, hal.157-160.

seperti *Zorostrianism, Buddhism, Yudaism*, tidak lain adalah gambaran adanya dua moral yang terdapat pada manusia, yaitu moral yang baik dan moral yang buruk yang selalu dalam perjuangan (*Two gods, then, contended in the world-the god of good and the god of evil*). Dikatakannya, terusirnya Adam dari Sorga karena pengaruh Iblis, dan terjadinya perkelahian dan pembunuhan antara kedua putera Adam, tidak lain adalah gambaran dari perjuangan antara negara yang bermoral baik yang dinamakan “Negara Tuhan”. (*Civitate Dei*) dengan negara yang bermoral jahat yang dinamakan “Negara Setan” (*Civitate Diaboli*).

Prinsip Augustine inilah yang dipakai oleh umat Katholik untuk mendirikan “Negara Gereja” yang dipimpin oleh Sri Paus sebagai wakil tertinggi dari Tuhan di bumi ini. Prinsip ini diperkuat oleh Thomas Aquino (1225-1274) dengan kedua bukunya yang terkenal “*Summa Theologiae*” dan “*Summa Contra Gentiles*”. Dalam irama keagamaan yang sama, muncul pula Erasmus (1466-1536) dengan bukunya “*Institutie principes Christiani*” yang memberi corak keduniaan.

Pendiri golongan Protestan, Marten Luther, (1483-1546) yang terkenal dengan bukunya “*Von Weltlicher Obrigkeit, Wioviel Man Ihr Geborsam Schuldig Sei*”, yang kemudian diikuti pula oleh Calvyn (1509-1564) dengan karyanya “*De Institutie religions Christianae*” menentang adanya negara gereja, tetapi berpendirian yang sama supaya negara mempunyai moral dan menjunjung agama.

Seorang sarjana dan ulama Islam Imam al-Ghazali (450-505 H./1058-1111 M) muncul dengan suatu teori yang radikal dan *ekstrem*, yaitu menggabungkan negara dengan moral, menjadi “Negara Moral” yang dinamakan dengan “*Siyasatul Akhlaq*”. Ia berpendapat sama dengan pemuka Kristen, mulai dari St. Augustine sampai Calvyn, bahwa unsur agama harus diperoleh dan dipertahankan dalam negara, bahkan al-Ghazali memajukan pula unsur-unsur lain yang harus dipersatukan dan digabungkan dalam negara tetapi dengan demikian tidak berarti adanya “Negara Agama”. Bahkan al-Ghazali menentang sekeras-kerasnya negara yang dipimpin dan dikendalikan oleh pendeta-pendeta atau guru-guru agama.

Ia hanya memajukan suatu negara moral yang dipimpin oleh manusia biasa, yang mempunyai moral yang baik. Negara dan moral tidak lagi merupakan dua barang yang terpisah, tetapi keduanya kompak. Menurut al-Ghazali negara yang tidak mempunyai moral berarti keruntuhan; dan sebaliknya moral yang tidak sejalan dengan negara adalah kelumpuhan. Pendapat al-Ghazali mempunyai dasar yang kuat dalam agama Islam. Tuhan telah mengutus para nabi dan rasul sejak dari zaman purbakala silih berganti adalah untuk memimpin manusia kepada akhlak yang utama. Sejak dari Nabi Adam, Ibrahim, Musa dan Isa, Nabi yang dijunjung oleh st. Augustine, Erasmus, Luther dan Calvin dan akhirnya Nabi penutup dari segala nabi yaitu Muhammad saw. adalah dengan tujuan yang sama, yaitu mengajak manusia supaya beriman kepada Tuhan dan mempunyai akhlak yang utama. Akhlak inilah yang dijadikan *Nabi* sebagai dasar untuk mengajak umat Islam menjadi umat mulia dalam wadah negara yang dipimpinnya, yaitu negara Islam yang pertama, kemudian diteruskan oleh para *al-Khulafa ar-Rasyidin*.

Negara Islam yang dibangun Nabi oleh Sherwani dinamakan “*Quranicstate*” (Negara Quran), yaitu negara yang dibangun atas dasar nilai-nilai Islam dengan dasar *Al-Quran*. Tetapi Imam al-Ghazali lebih suka memakai nama “Negara Akhlak”, atau “Negara Moral”, sesuai dengan sifat yang telah diproklamasikan oleh *Al-Qur’an* terhadap Nabi Muhammad sendiri.¹⁸

Teori al-Ghazali ini, senantiasa mendapat perhatian dari zaman ke zaman, bahkan tidak pula kurang dilakukan “kritik” baik oleh sarjana-sarjana atau ulama Islam maupun sarjana-sarjana Barat.

Sampai sekarang belum ada kesepakatan pendapat tentang konsep Negara Islam. Kenyataan historis menunjukkan adanya aneka ragam bentuk pemerintahan dalam dunia Islam pada masa silam. Sekalipun tahap *al-Khulafa’ ar-Rasidin* dipandang pihak muslimin *Sunni* sebagai suri teladan ideal sepanjang sejarah Islam, yang di dalamnya agama dan kekuasaan bersatu dalam pemerintahan berdasarkan hukum Islam tetapi realitas sepanjang pemerintahan Bani Umayyah (661-750) dan Bani ‘Abbas (750-1258) amat berbeda dengan tahapan masa

¹⁸. Ishomuddin, *Op.Cip*, Hal. 74-77

normatife itu. Realitas sepanjang sejarah Islam berbentuk fragmentasi *de facto* dalam imperium Islam sejak 850 M, begitupun watak dan kepentingan yang tidak bercirikan Islam dari para penguasa Islam, sudah tidak memperlihatkan eksistensi negara Islam yang Ideal.¹⁹ Tidak adanya satu pun konsep negara Islam yang disepakati membawa kepada timbulnya berbagai interpretasi tentang apa yang disebut dengan negara Islam itu. Ketidaksepatakan itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: negara Islam yang didirikan Nabi di Madinah yang dipandang ideal ternyata tidak memberikan suatu model terperinci,

Implikasi paling serius dalam praktek politik kenegaraan dan juga kebangsaan adalah bahwa tidak ada prinsip yang setara bagi seseorang “warga negara Islam”. Hanya mereka yang bergama Islam yang memperoleh hak dan kewajiban sebagai warga negara penuh. Bagi mereka yang non-Islam yang sering disebut sebagai *ahl- al-Kitab* dan mereka yang kafir *dzimmi*, meskipun dapat perlindungan sebagai kaum minoritas namun hak-haknya diperlakukan seperti warga negara kelas dua. Inilah sebenarnya keberatan dari para pemikir Islam *liberal* takkala konsep negara Islam yang eksklusif itu mau ditegakkan. Dengan diberlakukannya *syariat Islam* yang *eksklusif* di Sudan, warga negara Sudan yang beragama Kristen tidak bisa berpartisipasi politik secara penuh sehingga bangsa Sudan secara politik terbelah, baik identitas maupun hak-haknya, karena harus memberlakukan *syariat Islam* yang *eksklusif* itu.

Implikasi *kedua*, dalam hal ini lebih merupakan tanggapan terhadap isu politik kontemporer tentang pentingnya membangun kekuatan *civil society*. Hal ini yang menyebabkan negara Iran, setelah negara Islam itu di pimpin presiden Khatami, yang didukung oleh banyak kalangan menengah termasuk kalangan perempuan yang terdidik, menghendaki agar negara itu membuka proses demokratisasi dunia.

Dengan runtuhnya Orde baru, wacana *liberal Islam* tentang hubungan agama dan politik sekarang ini memegang diharapkan bisa menjadi alternatif : untuk tidak hanya menjaga pluralisme yang menandai dasar hidup kenegaraan, tetapi lebih dari itu juga harus mampu menyumbangkan secara substansial terciptanya masyarakat Indonesia baru yang lebih toleran, dinamis, adil dan

¹⁹ John I. Esposito, *Islam dan Politik Jakarta*, Bulan Bintang, Jakarta 1990, hal, 307

beradab. Disinilah sumbangan pemikiran Islam yang berwajah *humanistic* dan mementingkan kesamaan nilai-nilai universal agama untuk ditegakkan *relevansi* yang ditegakkan dalam kehidupan kaum muslimin Indonesia dimasa mendatang sebagai bukti bahwa Islam itu memang lengkap dengan demokrasi yang selama ini disangsikan oleh negara-negara Barat.

Bagi para pemikir politik Islam di Indonesia, apapun latar belakang *cultura* mereka, asalkan memiliki komitmen untuk membuka ajaran Islam terhadap kepedulian tegaknya demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan, maka seperti Nurcholis Madjid dengan paradigma intelektualnya, tokoh ini pemikirannya telah dipengaruhi oleh Ibnu Taimyyah telah membuka Islam dalam pergulatan pencarian demokrasi di Indonesia, juga tokoh seperti Abdurrahman Wahid yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan tradisi pemikiran pesantren mampu melahirkan gagasan demokrasi modern di Indonesia.

Saya beranggapan bahwa para tokoh seperti Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid serta tokoh-tokoh lain yang berani membuka Islam dalam kerangka tantangan sejarah masa depan merupakan kaum *mujtahidin* atau pembaharu sejati. Mereka adalah para pemikir reformis, mereka berpandangan bahwa tuntunan *Al-Qur'an* mengenai kehidupan bernegara tidaklah menunjuk kepada suatu model tertentu. Karena itu, mereka menyimpulkan bahwa soal negara dan pemerintahan lebih banyak diserahkan kepada ijtihad umat Islam. Tapi, sebagaimana umumnya para pemikir politik Islam modern juga cenderung berpendapat bahwa bentuk republik demokrasi lebih sejalan dengan nilai kandungan *Al-Qur'an*.

Setelah berakhirnya masa Orde Baru, para pemikir politik nasional mulai ramai membicarakan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah seorang pemikir tersebut adalah Prof. Dr. H. Muhammad Amien Rais, MA. Salah satu gambaran tentang dinamika Islam telah ditunjukkan oleh seorang pemikir Muslim Nasional, Amien Rais dalam sumbangannya terhadap perdebatan tentang apakah kaum Muslimin memiliki kewajiban agama untuk membangun Negara Islam, atau tidak. Berkaitan dengan hal itu, Penulis dalam tulisan ini mencoba memaparkan pemikiran-pemikiran Politik Amien Rais. Amien Rais memang tidak

menemukan konsep negara dalam *Al-Qur'an*. Secara lebih eksplisit, menurut Amien, Islam tidak memberikan petunjuk langsung dan rinci bagaimana umat Islam mengurus urusan negara. Namun demikian tidak berarti bahwa persoalan ini tidak bisa mengabaikan nilai-nilai *Al-Qur'an*. Amien Rais mencoba menelusuri persoalan ini dari dalam konteks sejarah lahir dan perkembangan Islam. Amien menunjukkan Dasar-dasar etik yang melandasi Negara Islam. Meskipun demikian pertanyaan wajibkah kaum Muslimin membangun negara Islam belum terjawab.

Majalah *Panji Masyarakat* No. 376, Th 1982, memilih judul "*Tidak ada Negara Islam*", demikian hasil wawancaranya dengan Amien Rais yang baru saja kembali ke tanah air setelah menyelesaikan studi doktornya bidang politik di Amerika. Pemikiran Amien Rais tentang konsep negara dalam perspektif Islam ini kemudian mendapat tanggapan positif dari mantan tokoh Masyumi Mohammad Roem dalam majalah yang sama pada edisi berikutnya.¹⁹

Amien Rais menyatakan; sebagaimana yang ditulis *Panji Masyarakat*, :

*Islamic State atau Negara Islam, saya kira tidak ada dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Oleh karena itu, tidak ada perintah dalam Islam untuk menegakkan negara Islam. Yang lebih penting adalah selama suatu negara menjalankan etos Islam, kemudian menegakkan keadilan sosial dan menciptakan suatu masyarakat yang egalitarian, yang jauh dari eksploitasi manusia atas manusia maupun eksploitasi golongan atas golongan lain, berarti menurut Islam sudah dipandang negara yang baik. Apakah artinya suatu negara menggunakan Islam sebagai dasar negara, kalau ternyata hanya formalitas kosong?*²⁰

Persoalan semacam ini sebelum Amien Rais sudah pernah diungkapkan pendahulunya, namun sesungguhnya, selama kaum Muslimim terus-menerus

¹⁹. Pemikiran Amien Rais dan tanggapan Mohammad Roem dalam majalah *Panji Masyarakat* kemudian mengundang minat Nurcholis Madjid, yang ketika masih pelajar di Amerika, untuk menulis surat kepada Mohammad Roem, sehingga terjadilah koresponden antara keduanya. Koresponden antara Cak Nur dan Mohammad Roem ini dapat dilihat dalam buku *Tidak ada Negara Islam*, Jakarta, Djambatan, 1997

²⁰. Lihat Amien Rais dalam, *Membangun Politik Adiluhung*, Bandung, Zaman Wacana Mulia, 1998, hal.91-92

berhadapan dengan proses sejarah yang berubah-ubah, bisa saja perbincangan ini mungkin tidak pernah usai. Selama kita masih beranggapan bahwa gagasan politik seperti “kebangsaan”, “Negara Islam”, “demokrasi” kita perlakukan sebagai social imagination,²¹ maka sesungguhnya tidak mungkin kaum Muslimin kehilangan kemampuan imajinasinya untuk memahami secara statis.

Dalam hubungan antara Islam dan ketatanegaraan, dalam pandangan Clifford Geertz memasukkan Amien Rais dalam kelompok substansialis yang corak pemikirannya ini tidak terkungkung nilai-nilai normative, sehingga bisa lebih leluasa dalam memahami teks dan tradisi Islam secara terbuka dan dinamis, sehingga menutup peluang bagi interpretasi baru sesuai dengan perkembangan kontemporer. Dalam pemikiran kaum substansialis, teks-teks normative itu akan lebih bermakna bila terhadapnya dilakukan penafsiran ulang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat; teks tidak bisa dilepaskan dari konteks, karena itu harus ada upaya reinterprestasi²². Istilah substansialis itu sendiri mengandung makna bahwa isi jauh lebih penting di banding dengan bentuk (label), karena corak pemikiran ini cenderung menafikan atau menganggap kurang berarti hal-hal yang bersifat simbolik.²³

Artikel-artikel Amien Rais dibidang pemikiran sosial dan politik selalu dianggap penting dan actual diantaranya adalah “*Tauhid Sosial*”, “*Syirik Politik*”, “*Desakralisasi Lembaga Kepresidenan*”, “*Zakat Propesi*”, “*Islam Substansial*”. “*High Politics-Low Polititcs*”.dan banyak lagi artikel yang lainnya.

Berikut ini disajikan informasi mengenai beberapa tulisan atau hasil penelitian terhadap ide dan pemikiran Amien Rais. Dalam artikel ditemukan cukup banyak karya yang ditulis mengenai diri dan pemikiran-pemikiran Amien Rais diantaranya. “*Melawan Arus Pemikiran dan langkah Politik Amien Rais*”, “*Suara Amien Rais Suara Rakyat*”, “*Amien Rais Sang Demokrat*”, “*Membunuh*

²¹. Imagination dalam *Kamus Inggris Indonesia*, oleh John M. Echolas dan Hassan Shadily, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, cetakan ke- 16, tahun 2002, h. 311. Adalah “Daya khayal, imajinasi, khayalannya menguasai dirinya”.

²². Interpretasi dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W.J.S. Poerwadarminta, Balai Pustaka, Jakarta, 1987. artinya “Tafsiran

²³. Lihat artikelnya berjudul “*Islam di Indonesia dari Skripturalisme ke Substansialisme*”, pada *Republika*, Kamis, 29 Juli 1999

Amien Rais”, “*Amien Rais dari Yogya ke Bina Graha*”, karya Muhammad Najib. “*Amien Rais, Gagasan dan Pemikiran Menggapai Masa Depan Indonesia Baru*”, “*Dari Dialog Nasional, Tabat nasional Hingga suksesi*”, “*Pendidikan Politik Gaya Amien Rais*”, karya Ahmad Bahar. “*M. Amien Rais dalam Sorotan Generasi Muda Muhammadiyah*”, karya Abd.Rohim Ghazali. “*Membangun Politik Adiluhung*”, karya Idi Subandy Ibrahim. “*Amien Rais Menjawab Isu-Isu Politis Sputar Kiprah Kontroversialnya*”, karya Imran Nasri. “*Tidak Ada Negara Islam*” Karya Agus Edi Santoso., “*Amien Rais Dan Isu Pemimpin Nasional*” karya Rudini. “*Politik Kepala Basah Amien Rais*” Karya Murdiyat Moko. “*Pendidikan Politik dari Amien Rais,*” karya Franz-Magnis Sueno Sj., “*Membaca Langkah Politik Amien Rais*”, karya Irawan djoko Nugroho. “*Kucing, Tikus dan Amien Rais*”, karya Rizal Penggabean.

Selain memaparkan biografi Amien Rais secara lengkap. Buku-buku ini juga dijelaskan pemikiran-pemikiran politik Amien Rais khususnya yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di Indonesia terutama pada masa pasca turunnya Soeharto selama 32 tahun memegang kekuasaan pada tahun 1988 yang lalu..

Buku “*Melawan Arus Pemikiran dan Langkah Politik Amien Rais*” yang berbicara tentang Amien Rais secara mendetail buku ini karya tulisan Ir.H.Muhammad .Najib M.Sc,²⁴ Salah seorang asisten pribadi Amien Rais dan

²⁴ Muhammad Najib lahir di Singaraja, Bali, 9 Agustus 1960. sejak mahasiswa, jebolan Fakultas Teknik Elektro Institut Sepuluh Nopember Surabaya (ITS,1986) ini sudah aktif di organisasi. Ia pernah menjadi ketua HMI Korkom ITS, lalu Ketua HMI Cabang Surabaya. Selesai kuliah, ia aktif di Pemuda Muhammadiyah dan menjadi ketua untuk wilayah Jawa Timur (1991-1993). Lalu Sekjen Pimpinan Pusat dari tahun 1993 sampai 1995. sejak Muktamar Muhammadiyah tahun 1995 di Aceh, yang mengangkat Amien Rais sebagai Ketua umum, Najib ditunjuk sebagai Ketua Hubungan Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sesuai dengan kedudukannya di PP Muhammadiyah, aktivitas Najib berskala internasional cukup berbilang. Ia antara lain menghadiri seminar tentang perdamaian di Prenceton, New Jersey.USA (1994): mewakili Indonesia dalam Internasional Youth Confrence di Kharthoum, sudan (1995): anggota Internasional Youth Forum, Khartoum , Sudan: anggota World Citizens diplomat, New Jersey, USA; anggota Asia Pasipic Bureu and Adult Education (ASBAE), New Delhi; anggota Older People and Adult Learning (OPAL), Canberra, Australia.

Ditengah-tengah kesibukannya sebagai Dekan Fakultas Unisma, Bekasi, Penyandang gelar Master yang diraihnya tahun 1993 dari Institut Teknologi bandung, ini sempat terlibat aktif dalam pergolakan reformasi, yang berujung dengan tumbangnya Soeharto. Pada saat-saat itulah Muhammad najid adalah orang yang selalu dekat berada di samping Amien Rais dan bertindak sebagai sekretaris pribadinya

penulis Biografi Amien Rais dalam jabatannya sebagai Ketua Hubungan Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga dipaparkan pandangan-pandangan Amien Rais, didalam buku itu diuraikan serta kritik-kritiknya selaku seorang ketua PP Muhammadiyah yang bergerak Amar Ma'ruf nahi Mungkar, terhadap berbagai ketimpangan sosial yang terjadi dimasa Orde Baru. dan dalam buku itu juga membahas Amien Rais dalam posisinya sebagai salah seorang tokoh Nasional Indonesia dan pengaruh pemikirannya. Terhadap perkembangan paham kebangsaan Indonesia. Ketika tokoh-tokoh politik kita berlomba menyanjung dan saling mencalonkan kembali Pak Harto untuk menduduki kursi Presiden RI untuk ketujuh kalinya. Amien Rais, berteriak lantang menentangnya dengan menggelorakan suksesi. Ketika para pengamat politik gandrung menggunakan kalimat-kalimat eufemisme dalam melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintahan Orde Baru yang otoriter saat itu. Amien Rais mengkritiknya dengan bahasa yang tegas dan lugas. Ketika para politisi menggunakan kalkulasi-kalkulasi untung rugi dan target-target posisi eksekutif maupun legislatif dalam menentukan langkah-langkah politiknya, Amien Rais cenderung mengabaikan semua itu dengan hanya mempertimbangkan kepentingan rakyat dan moral yang ia yakini kebenarannya. Maka, tidak berlebihan kalau Muhammad Najib menyebut Amien Rais telah melawan Arus dalam menjabarkan sikap politiknya. Ia melawan budaya politik yang sudah baku ketika itu.²⁵

Saya berharap tulisan ini secara sistematik dapat membawa bagi para pembaca dalam suasana hidup dalam mengikuti pemikiran Amien Rais yang sangat seras dengan tafsiran-tafsiran yang berangkat dari kehidupan nyata terhadap pesan Islam. Pemikiran Politik Amien Rais dalam tulisan ini penulis kira perlu kita renungkan bersama, terutama saat perdebatan tentang apakah umat Islam wajib membangun negara Islam di Indonesia atau tidak. Harus diakui bahwa di Indonesia kaum Muslimin adalah terbesar di dunia, yang sejak awal kemerdekaan oleh para pendirinya sebagai bukan negara yang eksklusif Islam,

²⁵. Muhammad Najib, *Melawan Arus, Pemikiran dan langkah Politik Amien Rais*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 1999, hal. 27-28

dengan merumuskan dasar ideology Pancasila sebagai keinginan politik kaum Muslimin sendiri yang sama-sama memiliki secara penuh hak-hak dan kewajiban.

Sepanjang yang penulis telusuri dari berbagai kajian dan penelitian yang dilakukan para pengamat politik atau social keagamaan serta para ilmuwan terhadap diri, pemikiran dan karya Amien Rais seperti dikemukakan diatas ternyata belum ada karya tulis yang khusus mengungkapkan dari segi konsep Negara Islam di Indonesia Pemikiran politik Amien Rais secara rinci dan mendalam. Berangkat dari kenyataan ini penulis mencoba menelusuri secara cermat pemikiran yang berkaitan dengan bidang politik, terutama pemikirannya mengenai konsep Negara Islam.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tentang Konsep Pemikiran Politik Amien Rais. tentang Negara dalam Islam
2. Untuk mendapatkan argumentasi mengenai Pemikiran Politik Amien Rais tentang Negara dalam Islam

C. Rumusan Masalah

Agar tujuan penelitian tersebut dapat dicapai, maka permasalahan-permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa Latar Belakang Pemikiran Politik Amien Rais tentang Negara dalam Islam.
2. Bagaimana Pendapat para tokoh politik terhadap Pemikiran Politik Amien Rais tentang Negara dalam Islam

D. Signifikansi Penulisan

Dalam penelitian ini diharapkan akan berguna :

1. Sebagai bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Politik Islam.

2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literature bagi perpustakaan khususnya dibidang Politik.
3. Untuk bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam pada masalah yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 5 (lima) BAB. BAB I tentang Pendahuluan, Rumusan Masalah, Sistematika Penulisan, Signifikasi Penelitian dan Metodologi Penelitian.

Dalam BAB II akan dikemukakan terlebih dahulu tentang Biografi Intelektual Amien Rais, a). Riwayat Hidup Amien Rais, b). Latar Belakang Pemikiran Politik Amien Rais, c). Karya-karya Amien Rais.

BAB III akan diuraikan tentang Prinsip-Prinsip Dasar dalam mengelola Negara dalam Islam.

BAB inti dari penelitian ini adalah BAB IV yaitu analisis Pemikiran Politik Amien Rais tentang Negara dalam Islam.

Pada BAB V memuat tentang Sistem Politik Islam yang meliputi a). Sistem Pemilihan Parlemen. b). Sistem Pemilihan Kepala Negara.

Sebagaimana lazimnya setiap peneltia ilmiah maka penutup dari penelitian ini adalah akan dibuat simpulan dan saran-saran penulis yang akan dimuat dalam BAB VI pada penelitian ini.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan pustakan (literature) yang memuat objek penelitian serta mempelajari bahan pustaka yang menunjang terhadap penelitian ini. Dan Wawancara yang penulis lakukan dengan mewawancari (bila memungkinkan) dengan Amien Rais, dan Orang-orang yang dekat

dengalnya. Kemudian menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, sehingga lebih sebagai dokumenter (documentary research). penelitian ini juga termasuk dalam katagore historis-faktual, karena yang diteliti adalah pemikiran seseorang.

2. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian ini adalah sejumlah bahan pustaka (literature), dan mewawancarai (bila memungkinkan) dengan Amien Rais, dan Orang-orang yang dekat dengannya yang berkaitan dengan permasalahan Pemikiran politik Amien Rais tentang Negara Islam.

Objek penelitian ini adalah hal yang berkenaan dengan masalah Konsep Negara Islam

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah :

a. 1. Negara Islam Pemikiran Politik Amien Rais yang meliputi :

Biografi Intelektual Amien Rais, Latar Belakang Pemikiran Politik Amien Rais. serta Karya-karya Amien Rais,

a. 2. Dasar-dasar Negara Islam adalah Amanah, Keadilan, Ketuhanan, dan Kedaulatan rakyat.

a. 3. Sisten Pemilihan Parlemen serta Sistem Pemilihan Kepala Negara.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitain ini adalah berupa literature atau buku-buku yang berkaitan denga permasalahan baik yang berkaitan dengan Negara Islam serta data-data dalam menujung permasalahan, serta wawancara (bila memungkinkan) dengan Amien Rais, dan Orang-orang yang dekat dengannya

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut

1. Survei keputusan, yaitu menghimpun data yang berupa sejumlah literature yang diperoleh di perpustakaan atau pada tempat lain ke dalam sebuah daftar bahan-bahan pustaka. Adapun perpustakaan yang menjadi tujuan adalah perpustakaan, Perpustakaan IAIN Antasari, Perpustakaan Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin, Perpustakaan Masjid Sabilal Muhtadhin, Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan, Perpustakaan Masjid Ar-Rahman Banjarmasin, Perpustakaan DPW PAN Kalsel. dan perpustakaan pribadi.
2. Studi Literatur, yaitu mempelajari, menelaah serta mengkaji bahan pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas.
3. Wawancara (bila memungkinkan) dengan Amien Rais, dan Orang-orang yang dekat dengannya
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.
 - a. Teknik Pengolahan Data
 - 1) Editing, yaitu mengecek terhadap data dan bahan-bahan yang diperoleh.
 - 2) Kategorisasi, yaitu data yang sudah diedit diklasifikasikan agar dipahami untuk dianalisa berikutnya.
 - 3) Interpretasi, yaitu memahami dan memberikan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan, kalau data tersebut perlu ditafsirkan.
 - b. Analisa Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah sedemikian rupa yang selanjutnya dilakukan analisis.

Analisis yang dipergunakan adalah dengan cara studi pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku masalah negara Islam. dan wawancara seputar negara Islam di Indonesia
6. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

 1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini Penulis mempelajari dan menelaah subjek dan objek penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam desain proposal. Setelah proposal diterima dan dikonsultasikan dengan dosen Pembimbing yang telah ditunjuk oleh pihak program pascasarjana untuk memuat permasalahannya ke dalam desain operasional untuk diseminarkan dan setelah mendapat surat riset Penulis mengadakan penelitian kepustakaan dan wawancara.

2. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini Penulis menghimpun data sebanyak-banyaknya dengan melakukan survei kepustakaan dan wawancara.

3. Tahap Pengolahan dan analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses analisis objektif yang diuraikan sesuai dengan konsep dasar penelitian.

4. Tahap Penyusunan

Pada tahap ini Penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika yang ada untuk menjadi sebuah karya ilmiah dengan melalui konsultasi dengan dosen Pembimbing hingga menjadi sebuah Tesis yang siap untuk diseminarkan.

8. Signifikansi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian bahan pustaka (library reseach) serta penelitian lapangan dengan cara wawancara tokoh yang diangkat serta dengan orang-orang yang dekat dengannya

2. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian ini adalah sejumlah bahan pustaka (literatur) yang membahas masalah Pemikiran Polilik Amien Rais tentang Negara Islam, Wawancara dengan tokoh-tokoh yang dekat denganya . Sedangkan objek penelitian ini adalah meliputi Biografi Intelektual Amien Rais, Latar Belakang Pemikiran Politik Amien Rais. serta Karya-karya Amien Rais, Dasar-dasar Negara Islam yang meliputi Amanah, Keadilan, Ketuhanan,

dan Kedaulatan rakyat Sistem Pemilihan Parlemen, dan Pemilihan Kepala Negara.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah Pemikiran Politik Amien Rais tentang Negara Islam. yang meliputi Biografi Intelektual Amien Rais, Latar Belakang Pemikiran Politik Amien Rais. serta Karya-karya Amien Rais, Dasar-dasar Negara Islam yang meliputi Amanah, Keadilan, Ketuhanan, dan Kedaulatan rakyat dan Sistem Pemilihan Parlemen dan Pemilihan Kepala Negara.

b. Sumber Data

Sumber data yang digali dalam penelitian ini adalah : Primer

4. Teknik Mengumpulkan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Survei ke Perpustakaan, yakni menghimpun data pada sejumlah literatur di Perpustakaan atau ditempat lain kedalam sebuah daftar bahan-bahan pustaka. Perpustakaan yang menjadi tujuan adalah perpustakaan IAIN Antasari, perpustakaan Nasional Republik Indonesia Propinsi Kalimantan Selatan, Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan. Pada awalnya penulis mencari bahan yang diperlukan melalui katalog, kemudian membuat catatan-catatan mengenai hal-hal yang dianggap penting dan berguna bagi penelitian yang dilakukan.

b. Studi Literatur, yakni mempelajari, menelaah serta mengkaji bahan pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti.

c. Studi Lapangan, yaitu melakukan wawancara (bila memungkinkan) dengan Amien Rais, dan Orang-orang yang dekat dengannya.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

1. Editing, yaitu mengecek data dan bahan-bahan yang diperoleh.
2. Kategorisasi, yaitu data yang telah die dit diklasifikasikan agar dipahami pada analisis berikutnya
3. Interpretasi, yaitu memahami dan memberikan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan, kalau data itu perlu ditafsirkan.

b. Analisa Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah sedemikian rupa dengan menggunakan analisis kualitatif.

Analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan normatif dengan titik tekan pada penelitian deskripsi terhadap pemikiran politik tentang konsep Negara Islam dalam pandangan Amien Rais

6. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini Penulis mempelajari dan menelaah subjek dan objek penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam desain Operasioal. Setelah proposal diterima dan dikonsultasikan dengan dosen Pembimbing yang telah ditunjuk oleh pihak program pascasarjana untuk memuat permasalahannya ke dalam desain operasional untuk diseminarkan dalam kelas dan setelah mendapat surat riset Penulis mengadakan penelitian kepustakaan. Dan wawancara

b. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini Penulis menghimpun data sebanyak-banyak nya dengan melakukan survei kepustakaan. dan wawancara

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses analisi objektif yang diuraikan konsep sesuai dengan dasar penelitian Tahap Penyusunan

Pada tahap ini Penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika yang ada untuk menjadi sebuah karya ilmiah dengan malalui konsultasi dengan Dosen Pembimbing hingga menjadi sebuah Tesis yang siap untuk diseminarkan.